

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Bogor lahir dari sebuah Kerajaan besar bernama Pajajaran yang memindahkan ibu kotanya ke tanah Pakuan pada tahun 1482 (dari tempat semula, yaitu Galoeh) Seiring dinobatkannya Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi menjadi raja Kerajaan Pajajaran. Perpindahan ibukota ini adalah untuk yang terakhir kalinya karena pada tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 yang kira-kira jatuh pada tanggal 8 Mei 1579 Masehi kerajaan besar ini pada akhirnya lenyap. Berakhirlah jaman pajajaran (1482-1579). Hancur dan hilanglah sebuah ibu kota kerajaan yang tersohor namanya. Kota itu ikalahkan tapi tidak untuk dikuasai. Lama kelamaan wilayah ini berganti rupa menjadi hutan belantara. Tidak ada catatan yang tertinggal mengenai Pakuan, ibukota Kerajaan Pajajaran setelah keruntuhannya pada tahun 1579. Seolah hilang dan baru ditemukan kembali setelah serangkaian ekspedisi yang dilakukan oleh Scipio pada tahun 1687, Adolf Winkler tahun 1690 dan Abraham van Riebeeck tahun 1704 dan 1709. Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106' 48' BT dan 6' 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Kota Bogor terbagi menjadi 6 wilayah kecamatan dan 68 kelurahan. Sesuai Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat, maka tujuan Kecamatan adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan Manajemen Pemerintah yang baik, (2) mewujudkan Bogor Tengah sebagai wilayah perdagangan yang aman dan ditunjang oleh permukiman yang tertata dan bersih, (3) Meningkatkan iklim kegotongroyongan masyarakat dan kerukunan hidup beragama, serta (4) Mengupayakan peningkatan kesehatan, pendidikan, perekonomian dan kesejahteraan sosial..

Penerapan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintahan sekarang digunakan sebagai wadah informasi kepada masyarakat atau sering kita sebut layanan E-Government. Penggunaan E-Government ini sendiri sudah didukung penuh oleh instruksi Presiden Republik Indonesia no.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan E-Government. Penggunaan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Namun, apakah kualitas dari E-Government di daerah Indonesia sudah bisa dinilai bagus, atau E-Government hanya digunakan untuk memenuhi permintaan saja. Penelitian sebelumnya dari Dana Sulistyono K dikatakan bahwa setelah melalui beberapa rangkaian penghitungan website – website E-Government tersebut masih belum memenuhi kriteria yang tepat. Dari Hanif Hoesin didapatkan bahwa masih banyak website E-Government yang bahkan dinilai tidak aktif. Oleh karena itu dibutuhkan aplikasi yang dapat melakukan penilaian secara real time dengan cara perankingan sehingga setiap daerah akan berusaha untuk memberikan yang terbaik.

Kota Bogor telah memiliki masterplan e-government yang menjadi acuan dalam pengembangan pada tahun 2014-2018. Selama tahun berjalan, banyak penyesuaian yang perlu dilakukan karena perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Masterplan e-government 2014-2018 akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan masterplan e-government periode 2019-2023, oleh karena itu telah dilakukan review yang komprehensif pada masterplan sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan agar di tahun 2019-2023 terdapat masterplan e-government yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Khusus dalam hal penyelenggaraan website Kota Bogor, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala demi menjamin berjalannya website sebagai salah satu ujung tombak media komunikasi dan informasi pemerintah kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat membuat Kota Bogor perlu melakukan berbagai macam penyesuaian. Kecepatan dan keakuratan pelayanan publik seakan menjadi standar yang diinginkan masyarakat. Cepat, mudah, dan murah merupakan 3 kata yang menggambarkan keinginan masyarakat ketika mendapatkan pelayanan publik.

Hasil penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Kota Bogor yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 oleh Tim Evaluator Eksternal yang dibentuk oleh Tim Nasional SPBE yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa indeks penyelenggaraan e-government di Kota Bogor sebesar 2,91 atau secara kualitatif Sangat Baik.

Namun demikian, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam segi tata kelola serta sistem monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem informasi manajemen berbasis elektronik, baik dari segi muatan informasi, transaksi, interaksi dan keterhubungan yang sifatnya integratif.

Kota Bogor, sebagai kota yang telah mengusung konsep pembangunan Kota Cerdas sejak tahun 2014 dimana salahsatu misinya adalah mewujudkan kota cerdas yang berwawasan teknologi informasi dan komunikasi belum berhenti di tahun 2019. Pada

RPJMD 2019-2024 Kota Bogor kembali menempatkan pembangunan kota yang cerdas sebagai salah satu misi dalam pencapaian visinya.

Oleh karena itu, Diskominfo sebagai dinas yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informasi publik harus terus berupaya untuk dapat menciptakan kondisi ideal sebagai berikut :Layanan TIK yang berkualitas kepada semua stakeholder, Mutu pelayanan publik yang terus meningkat, Memiliki kapasitas yang unggul dalam layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat informasi, Lingkungan masyarakat Bogor yang cerdas, dinamis dan kompetitif dalam persaingan lokal dan global, Jaringan komunikasi yang efektif dan efisien.

Fokus kepada upaya peningkatan kapasitas Diskominfo Kota Bogor dalam layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat informasi.

Pemantauan website merupakan proses pengujian dan verifikasi bahwa pengguna akhir dapat berinteraksi dengan aplikasi website seperti yang diharapkan dan merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan untuk memantau penggunaan website serta melakukan evaluasi, sekaligus tuntutan yang harus disikapi dengan baik oleh pemerintah. Di sisi lain, kesadaran Perangkat Daerah Khususnya kecamatan akan pentingnya mengelola website yang sudah disediakan menguatkan pentingnya informasi yang tertera pada masing-masing website dan dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat seperti website. Dengan tersedianya informasi di website, masyarakat dapat memperoleh informasi yang berlaku di Pemerintah Kota Bogor secara mudah dan cepat.

Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah metode keputusan multikriteria untuk pemecahan masalah yang kompleks. Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dalam efektifitas persoalan dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut kebagian-bagiannya. Menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hirarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas tinggi yang bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif sebagaimana yang di persentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Rekomendasi Website Aktif Dan Informatif Pada Kecamatan Tingkat Kota Bogor untuk menentukan kinerja pengelolaan web Kecamatan yang akan diberikan penghargaan karena saat ini belum di

tentukan bobot kriteria dan kriteria nya, sehingga menimbulkan keputusan yang kurang tepat, Penilaian kinerja pengelolaan web merupakan aspek yang sangat penting dari bagian kinerja kecamatan. Di samping itu, dengan melakukan penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dalam proses pemberian Rekomendasi Website aktif dan informatif. Pengembangan Prototipe Komputasi AHP yang digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk memberikan penghargaan terhadap hasil kinerja serta mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai Kecamatan berprestasi. Dan mengukur Mengukur tingkat ketepatan dan keefektifan metode AHP dalam menentukan website Kecamatan lengkap dan update.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya tentang penilaian website, maka akan digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan mengangkat judul “Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process untuk Rekomendasi Pemilihan Website Kecamatan Terbaik Tingkat Kota Bogor”.

B. Permasalahan

Penilaian web kecamatan aktif dan informatif di Kecamatan Tingkat Kota Bogor merupakan suatu proses penilaian untuk pemberian rekomendasi website aktif dan infromatif untuk pemberian penghargaan terhadap kecamatan berdasarkan hasil kinerja kecamatan. Selain itu beberapa alasan penting mengapa perlu dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan website dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, antara lain : Kota Bogor menjadi salahsatu peserta dari 25 Kabupaten/Kota di Indonesia dalam Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia Tahap 1 di tahun 2017, Tahun 2017 Kota Bogor menerima penghargaan Bubu Awards V.10 dalam katagori The Best Website Awards in Government, Dalam ajang Top IT dan Telco 2018 Kota Bogor menerima penghargaan Top Leader on IT Leadership 2018 dan Top IT Implementation on City Government 2018. Selain alasan di atas, pada bulan Agustus 2019 Kota Bogor mendapatkan gelar Juara 1 Pengelolaan Media Sosial Tingkat Kota/Kabupaten se Jawa Barat dan Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor memperoleh gelar Juara 3 Pengelolaan Media Sosial Tingkat Kelurahan/Desa se Jawa Barat berdasarkan hasil evaluasi penilaian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Ketidaksesuaian Penilaian web kecamatan aktif dan informatif di Kecamatan Tingkat Kota Bogor antara poin penilaian dan status keaktifan saat ini belum sesuai karena hanya di tentukan oleh data berita, data foto, dan data video, dan tentunya akan membuat hasil penilaian tidak akurat dan membuat pemberian penghargaan tidak sesuai. Mengingat bahwa poin penilaian tidak sesuai dengan status maka hasil penilaianpun tidak efektif contohnya pada Bulan Januari 2019 - Desember 2019 yang menjadi kecamatan aktif dan informatif adalah Kecamatan Tanah Sareal. sedangkan masih banyak yang mempunyai nilai diatas Kecamatan Tanah Sareal. Hal tersebut

dibuktikan pada tabel 1.1. Tentu Penilaian tersebut kurang tepat atau tidak efektif karena poin penilaian yang hanya berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 padahal dalam peraturannya terdapat pula kebijakan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government yang belum masuk kedalam poin penilaian.

Tabel 1. 1 Data Poin Penilaian Kecamatan

Nama Kecamatan	Poin Penilaian			Status	Status Ranging
	Data Berita	Data Foto	Data Video		
Kecamatan Bogor Barat	95	100	95	Kurang Lengkap	4
Kecamatan Bogor Selatan	95	97	96	Kurang Lengkap	3
Kecamatan Bogor Tengah	95	100	97	Kurang Lengkap	5
Kecamatan Bogor Timur	90	100	80	Kurang Lengkap	6
Kecamatan Bogor Utara	85	95	90	Lengkap & Update	1
Kecamatan Tanah Sareal	90	79	84	Lengkap & Update	2

(Sumber : Diskominfo Kota Bogor)

Berdasarkan tabel 1.1 data penilaian diatas ada beberapa kecamatan yang keluar dengan status lengkap dan update artinya belum sesuai hasil point penilaian dengan status kelengkapan website. Kondisi ini mengakibatkan beberapa kecamatan yang mendapatkan nilai lebih tinggi tetapi berstatus kurang lengkap karena hanya ditentukan oleh status penilaian akhir. Dalam menentukan Rekomendasi Website Aktif dan Informatif masih dilakukan dengan mengecek data websites satu persatu dengan kriteria – kriteria yang hanya berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013. Dimana proses yang berlangsung saat ini setiap kecamatan yang melakukan updating website hanya mengisi berita mendapatkan poin lebih besar sehingga memungkinkan bahwa hasil tersebut tidak akurat.

Berdasarkan hasil rapat pembahasan penilaian website menyatakan bahwa hampir semua pengambil kebijakan memberikan pernyataan bahwa proses penilaian website untuk rekomendasi website aktif dan informatif membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu. Dalam penilaian untuk rekomendasi website aktif dan informatif yang dilakukan saat ini dengan melihat satu persatu data kecamatan, sehingga butuh waktu lagi untuk mendapatkan hasil pemberian rekomendasi website aktif dan informatif sesuai dengan data website yang mengikuti standar penilaian yang ada. Hal ini menimbulkan proses pengambilan keputusan menjadi tidak efisien, sebab memerlukan

waktu yang lebih lama dalam penentuan dan cukup minyita banyak waktu dan tenaga, sehingga menjadikan proses tersebut kurang efektif

1. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Belum tepatnya penentuan Prioritas juara dalam lomba Web
- b. Belum efektifnya proses untuk penentuan Web dalam penentuan juara website

2. Pernyataan Masalah / *Problem Statement*

Berdasarkan identifikasi tersebut maka dapat disimpulkan pernyataan masalah yaitu belum tepatnya proses penentuan prioritas juara dalam lomba website dan belum efektifnya proses penentuan juara website Kecamatan tingkat Kota Bogor.

3. Pertanyaan Masalah / *Research Question*

- a. Bagaimana penerapan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk proses perancangan web?
- b. Seberapa tepat dan efektifnya penerapan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk proses penentuan juara website Kecamatan Tingkat Kota Bogor

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud dalam penelitian ini adalah untuk menerapkan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk proses penentuan Juara Lomba Website Kecamatan tingkat Kota Bogor sesuai dengan kriteria penilaian website dengan mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan Juara Lomba Website Pada Kecamatan Tingkat Kota Bogor menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* secara efektif dan tepat.

2. Tujuan Penelitian

- a. Mendapatkan Urutan yang tepat dalam pemilihan website Kecamatan Terbaik yang menjadi juara dalam rangka pemberian penghargaan terhadap hasil kinerja pengelolaan website dalam lomba website.
- b. Meningkatkan efektifitas dalam proses penentuan Pemilihan Website Kecamatan Terbaik dan menjadi juara.
- c. Mengembangkan Prototipe Permodelan Komputasi AHP untuk Rekomendasi Pemilihan Website Kecamatan Terbaik Tingkat Kota Bogor.
- d. Mengukur tingkat ketepatan dan keefektifan metode AHP dalam menentukan website Kecamatan lengkap dan update.

D. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan

Melalui penelitian ini diharapkan terciptanya produk berupa proses dan pengembangan sistem untuk Untuk Rekomendasi Website Aktif Dan Informatif Pada Kecamatan Tingkat Kota Bogor dengan spesifikasi :

- a. Aplikasi digunakan oleh Diskominfo Kota Bogor untuk menentukan pemberian penghargaan terhadap hasil kinerja pengelolaan web kecamatan yang lengkap dan terupdate secara tepat dan objektif.
- b. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.
- c. Aplikasi yang dikembangkan adalah Aplikasi berbasis Web. Pemilihan program aplikasi berbasis web dikarenakan agar aplikasi mudah diakses.
- d. Sistem Operasi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi bisa bermacam-macam seperti windows, macintosh, linux dan lain-lain selama ada browser di device yang digunakan.
- e. Seperti yang sudah diketahui pada latar belakang dan masalah yang ada, proses penilaian untuk pemberian rekomendasi website aktif dan informative belum tepat karena proses penilaian yang belum memiliki dasar penilaian yang tepat. Dengan adanya sistem ini, proses penilaian menjadi lebih efektif dan tepat.
- f. Hasil Rekomendasi Website Kecamatan Aktif dan Informatif adalah bagian utama dari sistem yang dikembangkan. Untuk mendapatkan Rekomendasi Website Kecamatan Aktif dan Informatif sesuai dengan kriteria penilaian yang menjadi standar dalam pembangunan website. Semakin website aktif maka kecamatan akan memiliki peluang untuk mendapatkan penghargaan terhadap hasil kinerja pengelolaan website.

E. Signifikasi Penelitian

Dalam rangka penelitian ini adalah menemukan teknik komputasi dengan pendekatan *Analytical Hierarchy Process (AHP)* untuk penentuan pemberian penghargaan terhadap hasil kinerja pengelolaan web kecamatan yang lengkap dan terupdate. Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Teoritis : Sumbangan pengetahuan dalam penerapan *Analytical Hierarchy Process (AHP)* untuk untuk menentukan pemberian penghargaan terhadap hasil kinerja pengelolaan web kecamatan yang lengkap dan terupdate secara tepat dan objektif.
- b. Praktis : Memudahkan Diskominfo untuk melakukan pemberian penghargaan terhadap hasil kinerja pengelolaan web kecamatan yang lengkap dan terupdate.
- c. Kebijakan : dapat dijadikan referensi acuan dalam sistem pengambilan keputusan penentuan pemberian penghargaan terhadap hasil kinerja pengelolaan web kecamatan yang lengkap dan terupdate.

F. Asumsi Dan Keterbatasan Pengembangan

1. Asumsi

Asumsi dari penelitian ini adalah:

- a. Dengan adanya penelitian ini maka akan memudahkan dalam proses Pemberian Rekomendasi website aktif dan informatif.
- b. Dengan adanya penelitian ini maka akan meningkatkan efektifitas dalam proses Pemberian Rekomendasi website aktif dan informatif.
- c. Penelitian ini menggunakan sistem yang hanya menampilkan pada tampilan web browser.

2. Keterbatasan Pengembangan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pengembangan yaitu:

- a. Pembangunan aplikasi menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).
- b. Aplikasi hanya diakses melalui Web Browser dan terkoneksi internet.
Data yang digunakan adalah data Pemerintah Kota Bogor selama dua tahun kebelakang

G. Definisi Istilah Atau Definisi Operasional

1. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan (home page) menggunakan sebuah browser menggunakan URL.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Konsistensi AHP adalah Proses analisis bertingkat (*Analytical Hierarchy Process* – AHP) dilakukan berdasarkan perbandingan pasangan yang digunakan pengambil keputusan untuk menetapkan preferensi antara alternative-alternatif keputusan untuk berbagai kriteria. Prosedur normal AHP dalam mengambarkan perbandingan pasangan adalah melalui wawancara untuk mendapatkan dari pengambil keputusan dengan menggunakan skala preferensi.
4. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
5. Alternative adalah penilaian diantara dua atau beberapa kemungkinan yang menjadi kandidat dalam proses pengambilan keputusan.
6. Platform adalah istilah dalam teknologi informasi mengenai sebuah perangkat lunak (software) yang dapat digunakan di beberapa sistem operasi yang berbeda.